

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J(2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Amal, I., & Colin Mac Andrew. (2000). Hubungan Pusat–Daerah dalam Pembangunan. Rajawali Press.
- Anggie Parawitha Lucca ,(2022). pola hubungan eksekutif - legislatif dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Mojokerto tahun 2020. Journal Publicuho. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Vol 5 No.3.
- Abdullah S dkk, Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik, Makalah dimuat dalam Jurnal Simposium Nasional Akuntansi,
- Abdullah, S. dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang: 23-26 Agustus 2006.
- Erliana Hasan, (2005) Komunikasi Pemerintahan. Jatinangor : Refika Aditama.
- Hamid Attamimi S.A, Peranan Keputusan Presidens Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Program Pasca Sarjana Univ. Indonesia, Jakarta, 1990.
- Halim, H. (2009). Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Jakarta: Kencana.
- Halim, A. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.
- Kusnu Goesniadhie. Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan (lex Spesialis Masalah). 2006. Surabaya. Hal 59.
- Mardiasmo. (2000). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi.
- Novianto M. Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, hal. 9.

Pariury, Gabrielle Issabelle O., and Priyo Hari Adi. "Political Interest Legislatif Dalam Pengalokasian Anggaran Daerah Pada Sektor Pekerjaan Umum."

Rifky Setya Ramandha, hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan dan penetapan APBD kota Semarang tahun 2016.

Rubin, I. S., The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. Second edition, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc, 1993.

Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel), Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal. 94.

Subechan dkk, Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus, Artikel dimuat dalam Jurnal Wacana Kinerja Vol. 17 No. 1.

Syukriy Abdullah & Abdul Halim. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2, Nomor 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.